

## **POLA KOMUNIKASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILU**

**Juwito dan Syfa Syarifa Alawiah**  
**Ilmu Komunikasi FISIP UPNV Jatim**

### **Abstraksi**

Penelitian ini dilakukan di daerah Magetan dan Jombang yang dipilih secara purposive. Teknik pengambilan sample dilakukan dengan menggunakan teknik cluster random sampling, diperoleh sampel sebesar 200 orang. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan setiap variabel penelitian dan tidak menguji hubungan antar variabel.

Berdasarkan hasil temuan data maka dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi politik perempuan pada pemilu 2004 sebagai berikut :

Dalam upaya untuk memperteguh pilihan politik, sebagian besar perempuan berupaya mendapatkan informasi politik melalui saluran komunikasi interpersonal, media massa, dan organisasi politik.

Pada saluran komunikasi interpersonal dan organisasi politik, sebagian besar perempuan ingin mendapatkan informasi tentang kemampuan calon legislatif dan presiden dalam memimpin. Pada saluran media massa, perempuan cenderung memilih informasi tentang tata cara pemilihan legislatif dan presiden.

Dalam proses komunikasi interpersonal untuk mendapatkan informasi politik, sebagian besar perempuan cenderung mengalami intervensi pilihan politik. Suami merupakan pasangan komunikasi interpersonal perempuan yang sering melakukan intervensi pilihan politik.

Pada proses komunikasi interpersonal, sebagian besar perempuan cenderung tidak mampu menjaga independensi pilihan politiknya setelah mendapatkan intervensi. Perempuan cenderung memilih pilihan politik yang disarankan oleh suami atau orang tua.

*Kata Kunci : perempuan dan politik*

### **PENDAHULUAN**

Dalam bidang politik masih banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan, padahal perempuan adalah mayoritas penduduk di Indonesia yang juga mayoritas sebagai pemilih (voters) dalam pemilihan umum. Akan tetapi dapat dilihat dari setiap institusi politik, perempuan selalu minoritas atau marginal dan keterwakilannya rendah. Dampak dari ketidakterwakilan perempuan di pusat-pusat pengambilan keputusan adalah absennya isu-isu yang menjadi perhatian perempuan dalam perdebatan-perdebatan politik yang ada.

Dengan adanya Undang-Undang Pemilu yang memberikan porsi 30 % keterwakilan perempuan pada bidang legislatif diharapkan akan membawa dampak ke arah transisi demokrasi yang dapat menghasilkan suatu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam proses demokratisasi politik. Menurut Chusnul Mari'ah, demokrasi pada dasarnya adalah *people rule* dan dalam bentuk pemerintahan yang demokratis, setiap warga mempunyai hak, kesempatan, dan suara yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan (Jurnal Analisis Sosial, 2001, 37). Pada kenyataannya, warga negara tidak dapat secara langsung membuat kebijakan. Mereka harus melakukannya melalui perwakilan agregasi politik yang disuarakan oleh partai politik maupun kelompok yang berkepentingan.

Pemilihan umum yang dilakukan pada tanggal 5 April 2004 (pemilihan anggota DPR) dan 5 Juni 2004 (pemilihan Presiden) sistem langsung adalah cara yang dianggap



paling tepat untuk mewakili suara rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Sayangnya berdasarkan pengalaman, banyak wakil perempuan yang tidak terpilih dalam proses pemilihan anggota DPR. Dengan demikian tidak ada keseimbangan gender dalam keterwakilan politik dengan komposisi jumlah perempuan. Sentimen ini sangat penting untuk diperhatikan karena gerakan-gerakan perempuan, berasal dari pemikiran absennya keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik. Dampak dari proses tersebut, kepentingan perempuan tidak teraktualisasikan dalam kehidupan bernegara.

Pilihan menuju pemerintahan, yang demokratis (*democratic governance*) mengandung beberapa konsekuensi dalam kehidupan bernegara. Salah satu yang terpenting adalah terjadinya pembagian kekuasaan, antara satu tingkat pemerintahan ke tingkat yang lebih rendah, antara birokrasi pemerintah dengan komunitas atau warga, maupun antara kelompok-kelompok warga sendiri. Distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan publik, merupakan bagian dari upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih demokratis. Untuk itu, dituntut adanya kemauan politik dari para pengambil keputusan untuk mengubah cara kerja dan cara berpikir maupun sikap mental yang sesuai dengan semangat *democratic governance*, yaitu semangat yang mendorong partisipasi setiap warga laki-laki maupun perempuan dalam perencanaan maupun pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan politik di daerahnya.

Di sisi lain, pemerintahan yang demokratis membutuhkan masyarakat yang juga memiliki semangat demokratis yaitu semangat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Jika melihat pengalaman pada masa lalu, mayoritas masyarakat Indonesia pada masa ini tidak terampil dalam melakukan proses komunikasi politik yang sangat dibutuhkan untuk mendorong adanya partisipasi publik yang produktif dalam pengambilan keputusan politik. Perempuan termasuk kelompok yang paling pasif dan sering ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik. Perempuan sebagai kelompok interest, memiliki kepentingan yang sama dengan laki-laki, namun di Indonesia kurang terorganisir dengan baik. Padahal begitu banyak keputusan politik yang dibutuhkan untuk merespon persoalan yang dihadapi perempuan, dan begitu banyak keputusan politik yang akan mempengaruhi nasib serta kesejahteraan perempuan.

Adanya perubahan UU Pemilu yang lebih banyak melibatkan perempuan dalam bidang politik dan juga adanya perubahan sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, dinilai perlu dilakukan penelitian tentang partisipasi perempuan dalam komunikasi politik. Penelitian ini lebih difokuskan pada pola komunikasi perempuan dalam menentukan hak pilih politiknya. Dengan mengkaji pola komunikasi perempuan dalam menentukan hak pilihnya, diharapkan dapat mengetahui kebebasan perempuan dalam menjalankan hak politik dalam memilih anggota dewan dan calon Presiden yang dikehendaki. Penelitian ini juga akan mencoba mengungkap secara jelas tentang pola komunikasi perempuan dalam melakukan penawaran (*bargaining*) politik dengan laki-laki di lingkungan sosialnya (khususnya dengan suami atau keluarga laki-laki) dalam menentukan pilihan politik untuk anggota dewan dan calon Presiden yang dikehendakinya.

Perubahan sistem politik dengan lahirnya Undang-Undang Pemilu baru dengan memberikan porsi perempuan pada bidang legislatif diharapkan dapat menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam proses komunikasi politik khususnya dalam hal pengambilan keputusan publik. Diskriminasi perempuan dalam bidang komunikasi politik selama ini merupakan implikasi dari proses komunikasi politik yang tidak *fair* dimana laki-laki lebih banyak mendominasi dalam proses komunikasi politik. Dampak lebih jauh dari dominasi ini adalah kebijakan-kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih



menguntungkan laki-laki daripada perempuan. Sebagai contoh hukum adalah salah satu alat yang sebenarnya amat diandalkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hukum sangat diharapkan dapat memberikan keadilan bagi perempuan korban. Namun fakta menunjukkan lain, hukum di Indonesia justru seringkali melakukan kekerasan terhadap perempuan. Akibat hukum yang tidak berperspektif gender, perempuan korban kekerasan justru dapat dipersalahkan, diperlakukan secara tidak hormat, atau dikorbankan lebih jauh. (Komnas Perempuan, 2002 : 200).

Melihat proses sejarah kepemimpinan Orde Baru menunjukkan bahwa ada tindakan pengucilan kaum perempuan dalam proses komunikasi politik. Hal ini bisa dilihat selama pemerintahan Orde baru, tingkat partisipasi perempuan sangat rendah yakni kurang dari 10 % di lembaga legislatif. Kabinet hanya menyediakan dua pos untuk menteri yang diisi oleh perempuan, yaitu menteri peranan wanita yang tidak memiliki kekuasaan dan sumber daya, dan menteri sosial. Ideologi di balik adalah perempuan mempunyai sifat *caring* dan *nurturing* atau domestikasi dari perempuan perempuan untuk melegitimasi sistem yang patriarki. Faktor lainnya adalah adanya proses kooptasi organisasi perempuan oleh negara. Ketidakmampuan perempuan untuk melakukan pembontakan atas dominasi sistem patriarki disebabkan oleh depolitisasi yang dilakukan oleh negara secara sistematis (Sjaifudin, 2001 : 71). Organisasi perempuan seperti PKK dan Dharma Wanita tidak dapat diandalkan sebagai alat advokasi kepentingan perempuan bahkan ada kecenderungan organisasi ini sebagai wadah untuk propaganda partai Golkar. Menurut Lycette (1994), ada beberapa faktor yang menjadi kendala partisipasi perempuan dalam komunikasi politik yaitu :

- Perempuan menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran reproduktif serta peran produktif, di dalam maupun diluar rumah. Peran produktif, perempuan berusaha membantu dalam hal pendapatan keluarga. Sedangkan peran reproduktif yaitu peran perempuan sebagai nyonya rumah (*home maker*) yang bertanggung jawab atas kegiatan reproduktif dan pekerjaan domestik. Adanya peran ganda tersebut, membatasi waktu pilihan-pilihan perempuan untuk berpartisipasi dalam komunikasi politik.
- Perempuan relatif memiliki pendidikan lebih rendah daripada laki-laki. Tingkat pendidikan perempuan yang rendah dan perbedaan kesempatan yang diperoleh anak perempuan dan laki-laki, terjadi di seluruh dunia. Akibatnya, jumlah perempuan yang tidak dapat mengakses informasi tentang peluang-peluang bisnis, kesempatan kerja, dan partisipasi dalam kehidupan politik pun menjadi tinggi.
- Adanya hambatan budaya yang terkait dengan pembagian kerja secara seksual dan pola interaksi perempuan dengan laki-laki yang membatasi gerak perempuan. Selain itu, pembatasan terhadap mobilitas perempuan yang didasarkan pada pertimbangan keamanan, juga merupakan hambatan yang muncul.
- Adanya hambatan legal bagi perempuan seperti larangan berpartisipasi dalam politik tanpa seijin suami.

Sedangkan menurut Shirley Ardener (pakar teori feminis komunikasi) menyatakan bahwa ketidakberdayaan perempuan dalam komunikasi politik memiliki beberapa manifestasi dan terlihat jelas dalam diskursus publik. Kaum perempuan merasa tidak nyaman dalam situasi publik dibanding laki-laki dan perempuan merasa tidak enak dalam situasi-situasi publik daripada mereka sendirian. Kaum wanita lebih hati-hati dengan apa yang mereka katakan dan menerjemahkan apa yang mereka rasakan dan pikirkan dalam pengertian-pengertian kaum pria (Littlejohn, 1999 : 406). Sedangkan Cheris Kramane menguraikan asumsi-asumsi dasar tentang ketidakberdayaan perempuan dalam komunikasi antara lain :



- Kaum pria dan perempuan memiliki pengalaman yang berbeda berdasarkan pemisahan tenaga kerja dalam masyarakat, mereka memandang dunia dengan cara yang berbeda.
- Kaum pria dominan secara politis dalam masyarakat dan oleh sebab itu sistem persepsi mereka menjadi dominan yang menyebabkan persepsi kaum wanita tidak adopsi secara luas.
- Kaum wanita harus menerjemahkan cara-cara pemahaman mereka sendiri ke dalam pengertian kaum pria tentang dunia untuk bisa berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Berdasarkan latar belakang masalah, ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bagaimana pola komunikasi perempuan dalam proses pengambilan politik yang berkaitan dengan penentuan hak pilih politiknya dalam memilih anggota dewan dan presiden ?
- b. Saluran komunikasi politik apa saja yang digunakan perempuan dalam proses menentukan hak pilih politiknya untuk memilih anggota dewan dan Presiden ?
- c. Informasi apa saja yang dicari perempuan berkaitan dengan menentukan hak pilih politiknya dalam menentukan anggota Dewan dan Presiden?
- d. Faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong dan menghambat partisipasi perempuan dalam proses komunikasi politik khususnya dalam hal menentukan hak pilih politiknya untuk memilih anggota dewan dan presiden ?

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Pelaksanaan penelitian partisipasi perempuan dalam proses komunikasi politik menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan tersebut dilaksanakan melalui beberapa metode yaitu observasi, kuesioner, dan juga menggunakan interview untuk memperdalam data penelitian. Lokasi penelitian tentang partisipasi perempuan dalam proses komunikasi politik ditentukan di daerah Kabupaten Jombang dan Magetan. Pemilihan daerah lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan hasil laporan penelitian (Jurusan Komunikasi, FIA, UPN Veteran Jatim) pada tahun 1999 menunjukkan bahwa pada kedua daerah tersebut, peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan tergolong rendah. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perempuan yang mempunyai hak pilih politik pada pelaksanaan pemilu tahun 2004. Pengambilan unit analisis sebagai satuan pengamatan dilakukan dengan menggunakan sistem random cluster sampling. Sistem sampling ini dilakukan dengan cara memilih daerah kecamatan dengan sistem random. Setelah dipilih tingkat kecamatan cluster primer, proses selanjutnya dilakukan pemilihan tingkat desa sebagai cluster sekunder dengan cara random. Ukuran sampel penelitian ini sebanyak 200 orang dengan rincian 100 orang pada kabupaten Jombang dan 100 orang lagi pada kabupaten Magetan.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **a. Komunikasi Politik Sebagai Tindakan Untuk Memperteguh Pilihan Politik**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Jombang dan Magetan Propinsi Jawa Timur dengan mengambil 200 orang responden menunjukkan beberapa gambaran tentang pola komunikasi politik perempuan dalam pemilu legislatif dan presiden 2004. Berdasarkan temuan data menunjukkan bahwa sebagian besar responden (83%) menggunakan hak pilih politiknya dalam pemilu 2004, dan sebanyak 17% responden tidak menggunakan hak pilihnya. Keputusan responden untuk memilih



maupun tidak memilih pilihan politiknya pada pemilu 2004 pada hakekatnya merupakan proses politik.

Sebelum melakukan pemilihan politik (voting), responden melakukan serangkaian kegiatan komunikasi politik dengan berbagai cara agar dapat meneguhkan pilihan politiknya. Sebagian besar responden (82%) mempertimbangkan secara matang pilihannya politiknya dengan cara memperkaya wawasan politik melalui akses informasi politik secara langsung melalui media massa, pertemuan dengan kader politik, kampanye politik, tetangga, teman dekat, atau anggota keluarga. Sedangkan 18% responden tidak pernah melakukan komunikasi politik melalui media massa, pertemuan dengan kader politik, kampanye politik, tetangga, teman dekat, atau anggota keluarga dalam upaya meneguhkan pilihan politiknya.

### **b. Pola Komunikasi Politik Perempuan**

Dalam penelitian ini tidak akan memfokuskan pada masalah rendahnya kepercayaan perempuan terhadap calon legislatif dan presiden, dan juga penyusunan nomor urut calon legislatif perempuan. Akan tetapi penelitian ini lebih memfokuskan pada pola komunikasi politik perempuan dalam pembuatan keputusan politik. Menurut Dan Nimmo, pemilih akan melakukan pencarian informasi politik terkait dengan ketidakpastian politik. Sebagian besar pemilih yang menghadapi ketidakpastian politik akan berusaha untuk mencari informasi politik melalui berbagai saluran komunikasi politik (interpersonal, media massa, atau organisasi politik) (Nimmo, 1978 : 144). Demikian juga pemilih perempuan pada pemilu 2004 akan berusaha mencari informasi politik karena terkait dengan ketidakpastian (entropy) politik yang tinggi. Dalam pemilu 2004 mempunyai tingkat ketidakpastian politik yang tinggi dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Ketidakpastian politik ini terkait dengan sistem pemilu yang relatif baru (sistem proporsional terbuka), banyaknya jumlah partai politik, dan jumlah calon legislatif.

Dalam upaya untuk mengurangi ketidakpastian politik, responden berusaha mencari informasi politik melalui berbagai saluran komunikasi politik. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa responden menggunakan beberapa saluran komunikasi politik dalam upaya memperteguh pilihan politiknya. Sebagian besar responden menggunakan saluran komunikasi interpersonal (62,20%) untuk mendapatkan informasi politik. Selain itu, responden juga menggunakan saluran media massa 28,04% dan organisasi politik sebanyak 9,76%.

#### **b.1. Penggunaan Saluran Interpersonal**

Komunikasi interpersonal merupakan kegiatan pertukaran pesan politik yang dilakukan oleh responden secara tatap muka dengan orang lain. Saluran komunikasi interpersonal lebih banyak dipilih oleh perempuan untuk mendapatkan informasi politik. Merujuk pendapat Shirley Ardener (Dalam Littlejohn, 1999 : 406). Ada beberapa alasan, mengapa perempuan cenderung lebih memilih saluran interpersonal diantaranya :

- Perempuan merasa tidak nyaman dalam situasi publik dibandingkan laki-laki.
- Perempuan cenderung menghindari pertemuan pertemuan yang melibatkan masa besar dan cenderung memilih komunikasi dalam kelompok kecil.
- Perempuan lebih bersifat hati-hati dengan perasaan dan pikiran orang lain dibandingkan laki-laki.



Ada beberapa orang yang dipercaya oleh perempuan dalam upaya mendapatkan informasi politik. Sebagian besar perempuan cenderung memilih anggota keluarga sebagai sumber informasi politik. Sebagian lagi ada yang memilih orang lain diluar anggota keluarga sebagai sumber informasi politik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan dalam menggunakan saluran interpersonal cenderung memilih anggota keluarga (81,37%) sebagai sumber informasi politik. Sedangkan anggota keluarga yang banyak dipilih oleh perempuan dalam upaya mendapatkan informasi politik adalah suami (58,82%), selanjutnya ayah (11,76%), Saudara (7,86%) dan Ibu (2,94%). Kecenderungan perempuan memilih orang-orang yang dikenal dan dipercaya sebagai sumber informasi terkait dengan sikap kehati-hatian perempuan terhadap orang lain.

Disamping percaya pada anggota keluarga untuk mendapatkan informasi politik, ada juga responden yang lebih percaya pada orang di luar anggota keluarga. Adapun orang di luar anggota keluarga yang dipercaya perempuan untuk mendapatkan informasi politik adalah tetangga (7,86%), teman (6,86%), tokoh masyarakat (1,98%), dan pejabat desa (1,98%). Tetangga dan teman merupakan orang yang dianggap paling dekat oleh perempuan setelah anggota keluarga.

### **b.2. Media Massa Sebagai Saluran Komunikasi Politik**

Selain menggunakan saluran interpersonal, perempuan dalam mengurangi ketidakpastian politik juga menggunakan saluran media massa. Media massa merupakan alternatif saluran komunikasi politik yang kedua setelah saluran interpersonal. Dipilihnya saluran media massa sebagai saluran komunikasi politik karena sifat media yang bisa dinikmati oleh perempuan secara personal tanpa keterlibatan orang lain. Hal ini sesuai dengan sifat perempuan yang lebih suka mendapatkan informasi politik dalam situasi personal dan bukan situasi publik. Adapun media massa yang lebih banyak dipilih oleh perempuan dalam upaya mendapatkan adalah televisi (91 %) dan sebagian lagi adalah 9 % adalah surat kabar.

Sebagian besar (91%) responden memilih media televisi sebagai saluran komunikasi politik dikarenakan media ini mempunyai unsur pendukung yang lebih sempurna. Media televisi yang memiliki unsur audio dan visual dianggap mempunyai penjelasan yang lebih rinci dan jelas tentang realitas yang disajikan. Berbeda dengan media cetak atau radio, responden masih membutuhkan tenaga dan pikiran untuk memahami pesan yang disampaikan. Sebagian besar responden (60,9%) menggunakan media massa (terutama televisi) dengan tujuan mendapatkan informasi tentang tata cara pemilihan legislatif tahun 2004.

### **b.3. Saluran Organisasi Politik**

Selain itu, pemilih perempuan juga ada sebagian yang mendapatkan informasi politik melalui organisasi politik. Akan tetapi jumlah ini tidak terlalu besar hanya sebesar 11,11%. Semua organisasi politik peserta pemilu 2004 selalu terbuka bagi pemilih untuk mendapatkan informasi politik tentang misi dan visi partai, calon legislatif dan presidennya, serta tata cara pemilihan. Akan tetapi jarang sekali perempuan yang menggunakan saluran organisasi politik dalam upaya untuk mendapatkan informasi politik. Dalam saluran organisasi politik, yang lebih aktif untuk membina jaringan komunikasi dengan perempuan adalah pihak partai politik melalui kader partainya. Partai politik telah mengemas berbagai cara untuk membina hubungan dengan konstituantnya baik melalui media massa, kampanye, atau melalui kader-kadernya.



Sebagian besar (62,5%) responden menggunakan saluran organisasi politik dengan cara mendatangi kader partai politik tertentu. Kader partai sebagai kepanjangan tangan partai politik mempunyai tugas untuk mempersuasi pemilih agar memilih partainya. Hampir semua kader partai politik yang mendatangi pemilih perempuan berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan 25 % responden yang menggunakan saluran organisasi politik dengan cara mendatangi kampanye. Alasan mendatangi kampanye politik karena ingin melihat figure calon legislative juga ingin menikmati hiburan musik. Sedangkan responden yang menggunakan saluran organisasi politik dengan cara mendatangi kantor partai politik tertentu karena didorong ingin mendapatkan informasi politik tentang figure caleg juga ingin mendapatkan souvenir berupa kaos, topi, dan souvenir lainnya.

### **c. Independensi Perempuan Dalam Menentukan Pilihan Politik**

Dalam upaya mendapatkan informasi politik untuk meneguhkan pilihan politiknya ternyata sebagian besar responden (73,52%) pernah diintervensi dari pihak lain untuk memilih calon legislatif dan presiden tertentu. Sedangkan perempuan yang mengaku tidak pernah diintervensi dalam pilihan politiknya ketika menggunakan saluran komunikasi interpersonal dalam upaya mendapatkan informasi politik hanya sebesar 26,48%. Kebebasan untuk memilih suatu legislatif dan presiden merupakan hak pribadi perempuan. Akan tetapi dalam kenyataannya, perempuan seringkali mengalami intervensi ketika dalam proses mencari informasi politik untuk menentukan pilihan politiknya.

Suami merupakan anggota keluarga yang dominan dalam mengintervensi pilihan politik perempuan. Ketika melakukan proses komunikasi interpersonal dengan suami dalam upaya mendapatkan informasi politik, ternyata sebagian besar perempuan (83%) mengaku bahwa suami seringkali mengintervensi terhadap pilihan politiknya. Orang tua juga mempunyai dominasi terhadap pilihan politik perempuan. Ketika perempuan berhubungan dengan orang lain di luar anggota keluarga dalam upaya mendapatkan informasi politik, ternyata sebagian besar responden mengaku tidak pernah mendapat intervensi politik dari pihak di luar anggota keluarga seperti tetangga, pejabat desa, dan tokoh masyarakat.

Independensi perempuan dalam memutuskan pilihan politik ternyata mendapat tantangan yang lebih besar justru dari dalam anggota keluarga sendiri. Suami, orang tua, dan saudara mempunyai peranan besar untuk memporakporandakan kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan politiknya. Sebagian besar responden tergoyah keyakinannya setelah mendapatkan intervensi dari pihak lain dari dalam anggota keluarga. Suami merupakan orang yang paling dominan dalam melakukan intervensi terhadap istri dalam anggota keluarga. Sebagian besar perempuan ternyata mengikuti pilihan politik yang disarankan suami (56%). Ada juga perempuan yang tetap mandiri dalam melakukan pilihan politik. Setelah mendapatkan intervensi dari suaminya, istri tetap memilih pilihan politiknya sebesar 32 %. Sedangkan tindakan perempuan yang tidak memilih pilihan politik yang diyakini sendiri maupun disarankan suami tetapi justru memilih calon legislatif atau presiden lainnya sebesar 8% dan yang menjadi golput ada 4%.

### **d. Implikasi Ketidakbebasan Perempuan Dalam Pilihan Politik**

Adanya intervensi politik dari suami, teman, dan orang tua terhadap perempuan mengakibatkan pilihan politik perempuan tidak berjalan normal. Dari berbagai bentuk intervensi yang datang dari anggota keluarga maupun di luar anggota keluarga,



menunjukkan bahwa kecenderungan intervensi politik lebih mengarah pada calon legislatif daripada perempuan. Sedangkan untuk pilihan calon presiden intervensi tidak terlalu nampak menunjukkan kearah jender.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi yang datang dari anggota keluarga maupun di luar anggota keluarga pada pemilu legislative 2004 sebagian besar (77%) lebih mengarah pada calon legislative laki-laki. Sedangkan arah intervensi yang mengarah pada calon legislatif perempuan hanya 23 %. Tidak berbeda juga dengan pilihan presiden, sebagian besar arah intervensi lebih mengarah pada calon presiden laki-laki yaitu sebesar 55%. Sedangkan arah intervensi yang mengarah pada calon presiden perempuan sebesar 45 %. Pada pilihan presiden, arah intervensi pada perempuan dan laki-laki hampir seimbang mengingat calon presiden Megawati (sebagai calon perempuan) masih tetap mempunyai tingkat kepercayaan yang besar dari pemilih. Faktor yang menyebabkan menurunnya kepercayaan Megawati bukan karena faktor jender, melainkan karena menurunnya kredibilitas kepemimpinan Megawati.

Ada beberapa hal yang menyebabkan perempuan tidak memilih calon legislatif perempuan pemilu 2004 diantaranya :

- Belum adanya kepercayaan pemilih (khususnya perempuan) terhadap calon legislatif perempuan.
- Masih terjadi ketimpangan dalam penyusunan nomor urut calon legislatif perempuan di beberapa partai politik, dimana perempuan masih diletakkan dalam urutan bawah.
- Masih terjadi pola komunikasi politik yang timpang, dimana laki-laki lebih dominan dalam pembuatan keputusan pilihan politik. Implikasinya, laki-laki cenderung menyarankan pada pilihan politiknya pada perempuan. Paerahnya lagi, pilihan politik laki-laki cenderung mengarah pada calon legislatif laki-laki.

### KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis data, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian antara lain : Dalam upaya untuk memperteguh pilihan politik pada Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2004, sebagian besar perempuan berupaya untuk mendapatkan informasi politik melalui saluran komunikasi interpersonal, media massa, dan organisasi politik.

1. Ada beberapa jenis informasi politik yang diinginkan perempuan dalam proses komunikasi politik. Pada saluran komunikasi interpersonal dan organisasi politik, sebagian besar perempuan ingin mendapatkan informasi tentang kemampuan calon legislatif dan presiden dalam memimpin. Pada saluran media massa, perempuan cenderung memilih informasi tentang tata cara pemilihan legislatif dan presiden.
2. Dalam proses komunikasi interpersonal untuk mendapatkan informasi politik, sebagian besar perempuan cenderung mengalami intervensi pilihan politik dari pihak lain. Suami merupakan pasangan komunikasi interpersonal perempuan yang sering melakukan intervensi pilihan politik.
3. Pada proses komunikasi interpersonal, sebagian besar perempuan cenderung tidak mampu menjaga independensi pilihan politiknya setelah mendapatkan intervensi. Perempuan cenderung memilih pilihan politik yang disarankan oleh suami atau orang tua.



### DAFTAR PUSTAKA

- Arni, Mochamad, 1995. *Komunikasi Politik Di Indoensia*, , Erlangga, Jakarta
- Littlejohn, Stephen W., 1994. *Theories Of human Communication* (Six Edition), , Sage Publication, London
- Nimmo, 1978. *Political Communication And Public Opinion In America*, , Goodyear Publishing Company Inc, Santa Monica, California
- Nimmo, 1989, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media*, Remaja Karya , Bandung
- Rauf, Maswadi, Mappa Nasrun, 1993. *Indonesia dan Komunikasi Politik*, Gramedia, Jakarta
- Davies, Morton, R., Vauhan A. Lewis, *Model of Political System*, Praiger, Newyork – Washington - London
- Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia*, Ameeopro, Jakarta.
- UPN "Veteran" Jatim 1999. *Peran Perempuan Dalam Komunikasi Pembangunan*, Jurnal Analisis Sosial, 2001 *Perempuan Dalam Transisi Demokrasi Dan Globalisasi*, Vol. 6 No, 1, Februari 2001